

Beban Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi Negara

Ulfani Safitri¹ Aida Dian Rami²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2}

Email: ulfanisafitri41@students.unnes.ac.id¹ aidadianr@students.unnes.ac.id²

Abstrak

Beban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mencakup kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola aspek-aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara Indonesia. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Dinas memiliki tanggung jawab mengelola berbagai aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi, termasuk pemantauan penerapan peraturan ketenagakerjaan dan pelaksanaan program transmigrasi. Dinas terlibat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan investasi di sektor ketenagakerjaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha. Sebagai bagian dari administrasi negara, Dinas memiliki beban administratif untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai bagian dari administrasi negara, Dinas memiliki beban administratif untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Beban administrasi ini harus diimbangi dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, termasuk transparansi, keadilan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, Dinas memiliki peran strategis dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang efisien dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Administrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hukum

Abstract

The administrative burden of the Central Java Province Manpower and Transmigration Service includes obligations and responsibilities in managing employment and transmigration aspects in accordance with the provisions of Indonesian state administrative law. This research method is normative law and literature study. The results of this research are that the Department is responsible for managing various aspects of employment and transmigration, including monitoring the implementation of employment regulations and the implementation of transmigration programs. The Department is involved in coaching and supervising businesses and investments in the employment sector, ensuring compliance with regulations and providing guidance to business actors. As part of state administration, the Department has the administrative burden of compiling periodic reports on performance and coordinating with related agencies to maintain integration and efficiency in carrying out its duties. As part of state administration, the Department has the administrative burden of compiling periodic reports on performance and coordinating with related agencies to maintain integration and efficiency in carrying out its duties. This administrative burden must be carried by prioritizing the principles of state administrative law, including transparency, justice and the fulfillment of people's rights. In this case, the Department has a strategic role in carrying out its duties to provide efficient services and support sustainable development in Central Java Province.

Keyword: Administrative, The Departemen of Labour and Transmigration, Law



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kondisi administrasi negara Indonesia saat ini belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dapat dinilai dari banyaknya kritik yang dialamatkan pada instansi

pemerintah, baik manajemen, pelayanan, maupun organisasinya. Semua kritik dan keluhan yang disampaikan banyak bermuara pada aparat yang bertugas, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Salah satu fungsi negara adalah penyedia pelayanan publik dengan penyediaan layanan yang tidak boleh memperhitungkan seberapa besar profit atau keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, pelayanan publik akan bersifat ekonomis, artinya biaya yang dibebankan harus terjangkau oleh masyarakat. Diskursus tentang administrasi pemerintahan tidak akan pernah usai selama pemerintahan masih ada untuk mengelola kepentingan negara dan bangsa. Bahkan, saat ini studi administrasi pemerintahan semakin intens dilakukan tidak hanya karena kegagalan menampilkan prinsip tersendiri secara efektif dan efisien, tetapi juga karena ketidakmampuannya mengeliminasi diri dari kepentingan elite penguasa. Hal ini karena ketika negara dan pemerintah dikendalikan oleh politik kekuasaan, birokrasi sangat sulit menampilkan kinerja yang akomodatif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Tugas pemerintah adalah mencapai tujuan negara yang merupakan wujud komitmen bangsa dan tertuang dalam konstitusi negara. Dalam bidang ketenagakerjaan selain tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pun ikut andil di dalamnya, dalam pengawasan lapangan kerja dan administratif lapangan pekerjaan. Dalam hal ini Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga dinas yang bekerja di bidang administratif pekerjaan dan transmigrasi, khususnya pada level eksekutif pemerintah daerah yang memiliki keterampilan khusus di bidang administrasi pemerintahan.¹ Beban administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, yang mencakup efisiensi, transparansi, keadilan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal penyelenggaraan administratif Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah memiliki beban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah. Hal ini membuat mereka belum maksimal dalam menangani permasalahan lapangan pekerjaan dan transmigrasi yang mana akan menjadi konteks pembahasan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencakup sejumlah kewajiban dan tanggung jawab. Di bawah ini adalah gambaran umum mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah:

- a. Pengembangan Ketenagakerjaan: Mendorong pengembangan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Menyusun program dan kebijakan untuk meningkatkan lapangan kerja dan peluang pekerjaan bagi masyarakat.

¹ Trisnawati, D., Astuti, P., & Astrika, L. (2015). Peran Pemerintah dalam Memeberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 131-145.

- b. Penyelenggaraan Program Transmigrasi: Merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan program transmigrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Memfasilitasi proses pemindahan penduduk dari daerah asal ke daerah transmigrasi.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Tenaga Kerja: Menyenggarakan program penyuluhan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja. Memberikan informasi tentang pasar kerja dan peluang pekerjaan kepada masyarakat.²
- d. Pengawasan Kondisi Kerja: Melakukan pengawasan terhadap kondisi kerja di berbagai sektor untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Menyusun peraturan dan standar yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja.
- e. Penanganan Pengaduan dan Perselisihan Ketenagakerjaan: Menangani pengaduan terkait pelanggaran hak-hak pekerja atau permasalahan ketenagakerjaan. Memberikan mediasi dan penyelesaian sengketa untuk mengatasi perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.
- f. Pendayagunaan Tenaga Kerja: Memfasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menyusun kebijakan untuk mendayagunakan tenaga kerja lokal dan transmigran.

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:³

- a. Perencanaan dan Pengembangan: Merencanakan dan mengembangkan kebijakan serta program di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- b. Pelaksanaan: Melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- c. Pengawasan dan Pengendalian: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan.
- d. Koordinasi dan Kolaborasi: Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan publik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan bantuan kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- f. Pelaporan dan Evaluasi: Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi serta melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Dengan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kebijakan transmigrasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Beban Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini dapat menjamin segera terwujudnya *good local governance* karena pelaksanaan otonomi daerah memiliki justifikasi politik dan moral yang lebih kuat. Dari semua itu, yang harus diperhatikan adalah format penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan dan bisa diandalkan untuk mewujudkan *good local governance*. Beban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban oleh instansi tersebut dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia. Berikut adalah deskripsi mengenai beban administrasi yang dimaksud:

² Wulandari, K., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Analisis E-Service Bursa Kerja Online (Studi Kasus pada E-Makaryo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 299-317.

³ Website Disnakertrans Jawa Tengah, [https://disnakertrans.jatengprov.go.id/publik/profil/ZmYxNmY1OTQyNDIIMWIyZjRhZTk1ZDBkMzQwM2E3Yjc0MDNmNWZiMzFmNzQ4NDVIYTA5NDljNzQ3YjQ0Mw--](https://disnakertrans.jatengprov.go.id/publik/profil/ZmYxNmY1OTQyNDIIMWIyZjRhZTk1ZDBkMzQwM2E3Yjc0MDNmNWZiMzFmNzg4NDVIYTA5NDljNzQ3YjQ0Mw--)

1. Pengelolaan Ketenagakerjaan: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Ini mencakup pemantauan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat, dan penyelenggaraan program pelatihan tenaga kerja.⁴
2. Penyelenggaraan Transmigrasi: Dalam hal transmigrasi, Dinas ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi program transmigrasi. Ini mencakup pemantauan pemukiman transmigran, fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengembangan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam program transmigrasi.
3. Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan Investasi: Dinas juga memainkan peran dalam pembinaan dan pengawasan usaha dan investasi di sektor ketenagakerjaan. Ini mencakup pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta memberikan bimbingan kepada pelaku usaha.
4. Penanganan Pengaduan dan Perselisihan: Dinas harus siap menangani pengaduan dan perselisihan yang mungkin muncul terkait dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Ini mencakup proses mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵
5. Pemantauan dan Evaluasi Program: Dalam konteks administrasi negara, Dinas perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang mereka jalankan. Hal ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.
6. Pelaporan dan Koordinasi: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki beban administratif untuk menyusun laporan berkala tentang kinerja dan pencapaian mereka. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun nasional juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab administratif mereka.

Beban administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, yang mencakup efisiensi, transparansi, keadilan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah. Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai beban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menunjukkan bahwa entitas ini memiliki tanggung jawab yang kompleks dan signifikan dalam mengelola aspek-aspek ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dalam konteks ketenagakerjaan, Dinas ini berupaya menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak pekerja, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, dan menyelesaikan

⁴ Sonhaji, S., & SUHARTOYO, S. (2019). *Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terkait Kewajiban Perusahaan Dalam Kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

⁵ Maharani, A., Warsono, H., & Mustam, M. (2015). Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pendudukan Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 531-542.

sengketa dengan memegang prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.. Dalam upaya ini Dinas juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan administratifnya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Maharani, A., Warsono, H., & Mustam, M. (2015). Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 531-542.
- Sonhaji, S., & Suhartoyo, S. (2019). *Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terkait Kewajiban Perusahaan Dalam Kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Trisnawati, D., Astuti, P., & Astrika, L. (2015). Peran Pemerintah dalam Memeberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 131-145.
- Website Disnakertrans Jawa tengah,
<https://disnakertrans.jatengprov.go.id/publik/profil/ZmYxNmY1OTQyNDIIMWIyZjRhZTk1ZDBkMzQwM2E3Yjc0MDNmNWZiMzFmNzg4NDVIYTA5NDljNzQ3YjQ0Mw-->
- Wulandari, K., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Analisis E-Service Bursa Kerja Online (Studi Kasus pada E-Makaryo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 299-317.